

Impact Of Revocation Of Oil Fuel Subsidies In Accordance With The Concept Of Good Governance

Ila Karmila

Universitas Sebelas April

ila.feb@unsap.ac.id

Article Info

Article history:

Received Aug 12, 2022

Revised Sept 20, 2022

Accepted Oct 26, 2022

Keywords:

oil fuel subsidy, good governance

ABSTRACT

The essence of this research is to find out the impact of revocation of fuel subsidies in accordance with the concept of good governance as an effort to divert fuel subsidies from consumptive to productive. For the price increase, the government will prepare a compensation fund distribution scheme using electronic money. This assistance is realized through the distribution of Healthy Indonesia Cards (KIS), Smart Indonesia Cards (KIP), and Prosperous Family Cards (KKS). The distribution of compensation funds is a form of effort to implement President Joko Widodo's vision. However, KIS, KIP and KKS assistance is still questionable where the budget comes from. The implementation did not consult with the DPR and did not provide an explanation to the public where the funds for the cards came from. This ignores the principles of Good Governance or good governance, even though it is the prerogative of the President, but the mechanism adopted is less transparent and accountable. In the end, Pratikno (Minister of State Secretary) answered the criticism over the cost of issuing KIS, KIP and KKS. The budget for the issuance of all these cards comes from the BUMN Corporate Social Responsibility (CSR), which is only temporary, but for the following year, the procurement of KIS, KIP, and KKS will be included in the APBN. In fact, Pratikno recommends that the most important thing right now is to focus on the smooth implementation of the KIS, KIP, and KKS programs. The planning, implementation and evaluation stages are needed in the KIS, KIP and KKS programs for compensation for the increase in fuel prices, so it is not only the implementation that is carried out but the evaluation must also be carried out properly. If the planning, implementation and evaluation are not implemented or fail, then later it will be a futile program and only a waste of state money. It would be even better if the policy touched impact and did not stagnate in output or outcome. This can be done through the official website in the form of information so that the public can access it easily



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ila Karmila,
Program Studi Manajemen,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jalan Angkrek Situ No 19 Sumedang 45322.
Email : ila.feb@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Era globalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat di suatu negara, terutama dalam hal mensejahterkan masyarakat masih menjadi polemik bagi bangsa dan negara. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di Indonesia untuk melakukan pelayanan publik dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat salah satunya adalah melalui pelaksanaan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak).

Pemberlakuan subsidi BBM secara konsisten mengakibatkan pemerintah harus menyediakan anggaran rutin untuk penjualan BBM di dalam negeri seperti minyak tanah, bensin, avgas, avatur, dan jenis BBM lainnya dengan harga murah. Dengan kebijakan ini, subsidi BBM dengan sendirinya berefek pada peningkatan permintaan BBM yang sekaligus meningkatkan penggunaan energi listrik di dalam negeri. Dengan konsistensi subsidi BBM ini, baik masyarakat maupun perusahaan dinobatkan oleh pembelian harga BBM yang murah di dalam negeri dengan mengabaikan faktor kelangkaan sumber-sumber alamnya. Hal ini justru mendorong peningkatan konsumsi BBM dalam negeri karena masyarakat sudah terlanjur disuapi BBM domestik yang murah dan pemerintah pun tampaknya semakin tidak realistis terhadap perkembangan harga BBM internasional yang cenderung meningkat.

Atas terjadinya pencabutan subsidi BBM tersebut, banyak terjadinya pro dan kontra dari kalangan masyarakat maupun para elit politik. Salah satu alasan yang menolak atas pencabutan subsidi BBM adalah kekhawatiran adanya lonjakan harga barang dan jasa serta akan terjadi peningkatan angka kemiskinan. Selain itu, menurut Herman Khaeron (Ketua DPP Partai Demokrat) pemerintahan mengabaikan prinsip *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR atas kebijakan pencabutan subsidi BBM meskipun hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden, namun mekanisme yang ditempuh kurang transparan dan akuntabel.

Perumusan Masalah

Penulis membatasi rumusan masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan agar tidak melebar dari konteks permasalahan tersebut, diantaranya, yaitu:

1. Apa saja dampak atas pencabutan subsidi BBM terhadap keuangan Negara di Indonesia?
2. Apakah implementasi pencabutan subsidi BBM sudah sesuai dengan konsep *Good Governance* di Indonesia?

Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah:

- 1) Hasil penulisan ini semoga dapat memberi manfaat kepada semua pihak, khususnya kepada yang membacanya agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai “Dampak Pencabutan Subsidi BBM Bagi Keuangan Negara Indonesia Dalam Perspektif *Good Governance*”.
- 2) Semoga bisa dijadikan acuan dalam menganalisis kebijakan pemerintah yang akan merumuskan masalah atas dampak pencabutan subsidi BBM.

2. LECTURE STUDY

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah.

Secara ekonomi tujuan subsidi adalah mengurangi harga atau menambah keluaran (output). Arti kata subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah) (Makmun, 2008).

Suparmoko yang sebagaimana dikutip oleh Dungtji Munawar (2013), subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura (*in kind subsidy*).

Dengan demikian, subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa subsidi adalah bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada produsen dan konsumen suatu bisnis atau sektor ekonomi atas barang/jasa tertentu.

Good Governance

Dalam penyelenggaraan pemerintahan “*Good Governance*” menjadi sangat penting dan strategi mengingat kemunculannya di saat penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sedang mengalami distorsi terhadap efektivitas pelayanan kepada publik, dalam arti bahwa sudah menjadi bukan rahasia umum apabila berurusan dengan birokrasi pemerintah yang dialami yaitu berbelit-belit sangat lamban, penuh dengan pungutan liar, pelayanan yang kurang baik dan lain-lain. Oleh karena itu “*Good Governance*” seperti obat mujarab untuk mengobati penyakit birokrasi pemerintah tersebut.

Pengertian “*Good Governance*” itu sendiri menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut

governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*Good Governance*” (kepemerintahan yang baik). Agar “*Good Governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. “*Good Governance*” yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep “*Good Governance*” dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri

Sedangkan prinsip-prinsip *Good Governance* versi UNDP yaitu saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun uraian dibawah ini yang terkait dengan “prinsip good governance” adalah sebagai berikut :

- a. *Participation*; setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi Institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of Law*; kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak azasi manusia.
- c. *Transparency*; transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informal secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi dapat dipahami dan dapat dipantau.
- d. *Responsiveness*; lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder.
- e. *Consensus Orientation*; “*Good Governance*” menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
- f. *Effectiveness and Efficiency*; proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- g. *Accountability*; para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada pihak publik dan lembaga stakeholder.
- h. *Strategy Vision*; para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif “*Good Governance*” dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. (Istianto, 2011)

3. METHOD

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Melalui studi kepustakaan yang diharapkan dapat mempelajari “Dampak Pencabutan Subsidi BBM Bagi Keuangan Negara Indonesia Dalam Perspektif *Good Governance*” secara teoritis maupun empiris. Sumber-sumber data ini berupa buku, jurnal, internet, hasil penelitian dan penerbitan-penerbitan lainnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertumpu pada beberapa aliran, tradisi, atau teori yang kesemuanya menekankan pada pentingnya pengembangan penyusunan teori yang ditandai dengan strategi induktif empiris (Suyanto dan Sutinah 2007). Sebagai contoh kualitatif adalah penelitian yang dikonseptualisasikan sebagai studi kasus dan berfokus pada interpretasi, hal ini yang melibatkan data kualitatif. Atau, sebagai contoh metode campuran, mungkin sebuah survei kuantitatif yang akan diikuti dengan data kualitatif. (Punch, 2000)

4. RESULT AND DISCUSSION

Pengamat Ekonomi Enegeri dan Pertambangan Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai pemerintah cukup berat untuk kembali menggelontorkan tambahan subsidi dengan menambah kuota BBM Subsidi. Oleh karena itu, ada dua opti yang akan menjadi pilihan pemerintah saat ini yaitu menaikkan harga BBM subsidi atau dengan melakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi. Spertinya pemerintah enggak punya pilihan lagi, karena untuk menambah subsidi adalah hal yang mustahil. Maka pilihannya, menaikkan harga BBM subsidi atau melalui pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

Kalau itu yang dipilih, maka dampaknya akan terkena kepada semua lapisan hingga orang miskin sekalipun akan terkena dampak itu. Inflasinya akan 7,6 persen, ini orang miskin yang tidak pernah dapat subsidi BBM karena enggak punya sepeda motor pun akan terdampak. Jika pembatasan harus tepat sasaran, hal itu mngingat 70 persen pertalite dikonsumsi oleh masyarakat yang mampu, sementara 80 persen solar dikonsumsi oleh industri besar. Penerapannya akan lebih mudah jika dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2014 ditambahkan saja pertalite dan solar hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Di luar itu dipaksa harus pindah ke Pertamina. Dengan begitu, dampak inflasinya bisa dilokalisir, tidak sedasyat jika harga BBM subsidi dinaikkan. Dalam kondisi

saat ini, agar Presiden Jokowi bisa segera mengambil langkah bijak untuk mengumumkan kebijakan yang tepat. Hal ini sangat penting karena dengan isu kenaikan harga BBM subsidi yang berhembus saat ini bisa memuat masyarakat panik dan membeli BBM subsidi secara berlebihan.

Presiden Jokowi juga meminta kepada masyarakat bahwa proses peralihan di sektor konsumtif ke sektor produktif memerlukan waktu yang sangat panjang dan tidak langsung kelihatan, diperkirakan tahun depan akan terlihat realisasinya. Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi adalah dalam rangka mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Manafe, 2014).

Beberapa dampak yang terjadi akibat gembar-gembor kenaikan BBM subsidi seperti kenaikan harga bahan pangan yang mendorong inflasi, hingga pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah berlebihan. Keputusan pemerintah mengeluarkan bantalan sosial dinilai patut diapresiasi. Menurut Fahmy, dengan adanya bantalan sosial, kenaikan harga BBM subsidi diharapkan tidak terlalu membebani masyarakat miskin.

Belakangan ini Menteri Keuangan sudah mulai menyalurkan bantalan sosial kepada masyarakat miskin yang berhak menerima itu untuk membantu mereka memperoleh BLT, sebelum BBM bersubsidi dinaikkan. Karena Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa nantinya opsi yang dipilih tidak membebani masyarakat miskin.

Di Indonesia pengelolaan BBM dimotori oleh PT Pertamina (Persero) sebagai Perusahaan BUMN sejak tahun 1957 hingga berubah status hukum menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. (Pertamina.com)

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas dengan penghematan subsidi BBM, pemerintah akan meningkatkan produksi pangan dan akan mencapai swasembada pangan dalam dua tahun serta pengalihan subsidi juga akan digunakan untuk meningkatkan produksi energi, mempercepat pembangunan pembangkit listrik, sektor maritim, dan pembangunan jalan.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah akan menyiapkan skema penyaluran dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menggunakan uang elektronik. Menurut Menteri Keuangan kompensasi yang akan diberikan kali ini agak berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Sementara (BLSM) karena pemerintah tidak sekadar memberikan uang tunai, namun memberi bantuan secara spesifik untuk kesejahteraan masyarakat. Ia pun mengatakan bahwa bantuan tersebut diwujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penyaluran dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi melalui kartukartu tersebut adalah wujud upaya penerapan visi Presiden Joko Widodo.

Ketiga program itu akan menjadi skema tetap penyaluran bantuan dari pemerintah bukan yang sifatnya ad hoc (sementara), cara ini akan efektif karena memiliki sistem yang jelas. Nantinya, kartu-kartu ini diberikan kepada satu keluarga. Kartu Keluarga Sejahtera berfungsi menjaga daya beli masyarakat. Kartu Indonesia Sehat digunakan untuk pembiayaan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit. Dan anak-anak di dalam keluarga akan menerima Kartu Indonesia Pintar sebagai bentuk penyaluran bantuan pendidikan. (Nawangwulan, 2014) Dengan demikian, kekhawatiran masyarakat atas kenaikan harga BBM akan diberikan kompensasi oleh pemerintah dengan kartu-kartu tersebut yang tentunya harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Disamping itu, kenaikan harga BBM dinilai belum tentu meningkatkan angka kriminal jalanan. Kenaikan harga BBM justru membuat para mafia migas terusik kepentingannya. Menurut Muhammad Mustofa (Kriminolog Universitas Indonesia) Kenaikan harga BBM yang paling terkena dampaknya adalah mafia migas. Selama ini, mafia migas merasa berada di zona nyaman untuk beraksi dan mafia migas justru senang sekali melihat mahasiswa demo atau yang kontra terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.

Dampak Pencabutan Subsidi BBM Setiap ada rencana pemerintah dalam mengurangi subsidi harga BBM, pasti selalu ada pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun elit politik. Sebagian masyarakat merasa perlu tetap ada subsidi untuk membantu masyarakat miskin. Namun sebagian lainnya percaya, dana subsidi harusnya dialihkan ke sektor produktif yang tujuan akhirnya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Katadata berpendapat bahwa Pemerintah perlu segera menyusun rencana (*roadmap*) yang jelas untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap guna mengakhiri era BBM murah.

Pemerintah sebaiknya kembali menerapkan kebijakan subsidi tetap harga BBM seiring fluktuasi harga minyak dunia, seperti pernah diterapkan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Berikut ini ada 10 alasan menurut Katadata mengapa harga BBM saat ini harus naik : Pertama; Indonesia negara boros subsidi, Kedua; neraca defisit dan rupiah terpukul, Ketiga; 53% subsidi dinikmati mobil pribadi, Keempat; Indonesia bukan kaya minyak, Kelima; Indonesia bukan lagi eksportir minyak, Keenam; rezim subsidi BBM kian ditinggalkan, Ketujuh; Negara petrodolar pun siap pangkas subsidi, Kedelapan; dana migas tekor untuk subsidi energi, Kesembilan; ketimpangan subsidi energi, Kesepuluh; menghambat tumbuhnya energi alternatif. (Katadata, 2014)

Adapun dampak kenaikan harga BBM yang dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif di Negara Indonesia, yaitu : dampak positifnya adalah 1) masyarakat akan beralih ke BBM nonsubsidi (pertamax), 2) masyarakat akan beralih ke transportasi publik, 3) berkurangnya pencemaran udara, 4) pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Dampak negatifnya adalah 1) meningkatnya jumlah pengangguran yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan, 2) naiknya harga barang dan jasa, 3) terjadinya inflasi terhadap perekonomian Indonesia.

Namun disamping terjadinya kenaikan BBM di Indonesia, ternyata harga minyak dunia merosot ke titik terendah setelah negara produsen minyak yang tergabung dalam OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*) memutuskan tidak menurunkan produksi di tengah pasar yang kelebihan pasokan. Artinya harga minyak dunia turun tapi harga BBM di Indonesia malah naik, oleh karena itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan pemerintah akan terus memantau pergerakan harga minyak dunia yang terus melemah, jika harga turun terus, artinya harga keekonomian juga akan turun. Serta pemerintah akan menjaga disparitas harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi setipis mungkin.

Dengan demikian, penyelundupan dan penyelewengan BBM bersubsidi bisa diatasi. Kondisi ini memungkinkan harga BBM bersubsidi harus terus didorong mendekati harga pasar. Di sisi anggaran, beban subsidi yang kecil memberikan ruang bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur. (Firmansyah dan Munthe, 2014)

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) justru menyebut kunci besaran inflasi setelah kenaikan harga (BBM) bersubsidi berasal dari tarif angkutan umum. Sebab, menurut BI, berdasarkan pengalaman kenaikan BBM bersubsidi sebelumnya, komponen penyumbang inflasi tertinggi adalah kenaikan tarif angkutan umum. BI meyakini, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan terlalu berdampak negatif pada laju inflasi. Namun, BI akan menyiapkan sejumlah kebijakan strategis agar dampak kenaikan BBM tetap terkendali. Langkah strategis yang akan ditempuh adalah bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi. (Globalindo, 2014).

Dengan demikian, bahwa strategi dan solusi yang diberikan oleh Jokowi adalah dengan melakukan monitoring atau pengawasan yang biasa dikenal dengan sebutan blusukan, untuk memastikan distribusi barang terutama kebutuhan pokok agar tak terhambat dan tidak ada lagi penjual “nakal” yang secara sengaja menaikkan harga barang yang dapat menimbulkan inflasi yang tinggi, serta kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus saling terkoordinasi dalam pengurangan inflasi.

5. CONCLUSION

Kenaikan harga BBM bersubsidi adalah dalam rangka mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif menjadi produktif. Atas kenaikan harga tersebut, pemerintah akan menyiapkan skema penyaluran dana kompensasi dengan menggunakan uang elektronik. Bantuan tersebut diwujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penyaluran dana kompensasi tersebut adalah wujud upaya penerapan visi Presiden Joko Widodo. Namun, bantuan KIS, KIP dan KKS masih dipertanyakan darimana asal anggaran tersebut. Implementasinya pun tidak berkonsultasi dengan DPR dan tidak memberikan penjelasan kepada publik darimana asal dana kartu-kartu tersebut. Hal itu mengabaikan prinsip *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden, namun mekanisme yang ditempuh kurang transparan dan akuntabel.

Pada akhirnya Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) menjawab kritikan atas biaya penerbitan KIS, KIP dan KKS. Penerbitan semua kartu tersebut anggarannya berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN yang sifatnya hanya sementara, namun untuk tahun berikutnya, pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan dimasukkan ke dalam APBN. Bahkan, Pratikno menganjurkan bahwa yang terpenting sekarang ini adalah fokus pada kelancaran penyelenggaraan program KIS, KIP, dan KKS.

Adapun dampak kenaikan harga BBM yang dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif di Negara Indonesia, yaitu : dampak positifnya adalah Pertama; masyarakat akan beralih ke BBM non-subsidi (pertamax), Kedua; masyarakat akan beralih ke transportasi publik, Ketiga; berkurangnya pencemaran udara, Keempat; pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Dampak negatifnya adalah Pertama; meningkatnya jumlah pengangguran yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan, Kedua; naiknya harga barang dan jasa, Ketiga; terjadinya inflasi terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini merupakan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang beresiko tinggi dalam mengambil sebuah tindakan dan masyarakat harus siap dalam menerima kenaikan BBM tersebut.

Selain itu, pemerintah juga akan terus mengawasi ketersediaan barang di pasar. Sehingga, masyarakat tidak sulit mencari bahan kebutuhan pokok sehingga harganya dijual mahal oleh pedagang. Misalnya seperti stok barang

yang ada di grosir dan distributor yang akan terus dicek dan dipantau agar inflasi yang ditargetkan tidak lebih dari 2 persen. Dengan demikian, bahwa strategi dan solusi yang diberikan oleh Jokowi adalah dengan melakukan monitoring atau pengawasan yang biasa dikenal dengan sebutan blusukan, untuk memastikan distribusi barang terutama kebutuhan pokok agar tak terhambat dan tidak ada lagi penjual “nakal” yang secara sengaja menaikkan harga barang yang dapat menimbulkan inflasi yang tinggi, serta kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus saling terkoordinasi dalam pengurangan inflasi.

6. SUGESTION

Penulis melihat bahwa kenaikan harga BBM merupakan hal yang fundamental bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah seharusnya bisa mencari solusi atas fenomena yang terjadi di masyarakat terutama dalam hal kenaikan BBM. Adapun saran-saran yang diberikan oleh penulis untuk sebagai masukan, sebagai berikut:

- 1) diperlukan tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam program KIS, KIP dan KKS atas kompensasi kenaikan harga BBM, jadi jangan hanya pelaksanaannya saja yang dilakukan tapi evaluasi pun tetap harus dilakukan dengan baik. Apabila dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tidak diterapkan atau gagal, maka nantinya akan menjadi program yang sia-sia dan hanya menghamburhamburkan uang negara. Lebih bagus lagi apabila kebijakan tersebut menyentuh impact (dampak) dan tidak stagnan di output atau outcome. Hal tersebut dapat dilakukan melalui website resmi dengan berupa informasi agar publik dapat mengaksesnya dengan mudah.
- 2) sebelum menaikkan harga BBM atau dicabutnya subsidi BBM, ada baiknya pemerintah memberantas mafia migas terlebih dahulu, baru kemudian di evaluasi kinerja PT. Pertamina.
- 3) prinsip-prinsip *Good Governance* harus segera diterapkan agar kekhawatiran masyarakat atas anggaran kompensasi kenaikan harga BBM seperti program KIS, KIP dan KKS dapat diselesaikan dengan baik. Terutama transparansi dan akuntabilitas yang harus bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah, contohnya bisa dilakukan melalui website resmi dengan berupa informasi

REFERENCES

- Adityowati, Putri. (2014). 4 Alasan Gerindra Tolak Jokowi Naikkan BBM, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022;
- Aspasia, Noor. (2014). Wapres: Kartu Sakti Punya Payung Hukum, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022.
- Asril, Sabrina. (2014). Jokowi Tetapkan Harga Premium Rp8.500 dan Solar Rp7.500, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022.
- _____, (2014). Mensesneg: Anggaran Cetak KIP, KIS, dan KKS dari CSR BUMN, yang diakses pada tanggal 3 Agustus 2022.
- Firdaus, Randy Ferdi. (2014). BBM Naik, PKB Janji Kawal Jokowi Berantas Mafia Migas, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022.
- Firmansyah, Fery dan Bernadette Christina Munthe. (2014). Harga BBM Naik, Sofyan Djalil Malah Yakin Inflasi Menciut, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022, .
- Gatra, Sandro. (2014). Demokrat Minta Presiden Jokowi Tidak Abaikan “Good Governance”, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022, .
- Globalindo, (2014). BI Siapkan Kendali Inflasi Dampak Kenaikan Harga BBM, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022
- _____, (2014). Ini Strategi Jokowi Tekan Inflasi Pasca Harga BBM Naik, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022.
- Istianto, Bambang. (2011). Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- JPNN, (2014). BBM Naik, Inflasi Sulit Dibendung, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022, .
- Kamaludin, Arief. (2014). Dampak Kenaikan Harga BBM, Inflasi November 1,5 Persen, yang diakses pada tanggal 3 Agustus 2022.
- Katadata, (2014). 10 Alasan Harga BBM Harus Naik, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022, .
- LIPI, (2005). Pusat Penelitian Politik Year Book 2005 Politik BBM, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Makmun, (2008). Studi Kemampuan Daerah Dalam Memberikan Subsidi Listrik, Dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, LIPI, Vol. XVI (1), Jakarta.
- Manafe, Imanuel Nicolas. (2014). Jokowi: Kenaikan Harga BBM Untuk Alihkan Konsumtif ke Produktif, diakses pada tanggal 11 Desember 2014, 4/11/19/jokowi-kenaikan-harga-bbmuntuk-alihkan-konsumtif-ke-produktif>

- Munawar, Duntji, (2013). Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi Dalam APBN, diakses pada tanggal 11 Desember 2014, .
- Nawangwulan, Maya, (2014). Harga BBM Naik, Ada Kartu Sehat, Pintar, Sejahtera, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022
- Nurcholis, Hanif, (2005), Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Penerbit GRASINDO (Gramedia Widiasarana Indonesia),. Pertamina, Sejarah Pertamina, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022
- _____, Profil Perusahaan, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022, .
- Prabowo, Dani, (2014). Demokrat: Naikkan Harga BBM, Presiden Jokowi Terindikasi Langgar UU, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022
- Punch, Keith F., (2000). Developing Effective Research Proposals, London: SAGE Publications. Saputri, Dessy Suciati, (2014). Andrinof: Subsidi BBM Dialihkan ke Sektor Produktif, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022, .
- Suyanto, Bagong dan Sutinah ed., (2007). Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta: Kencana. Virdhani, Marieska Harya, (2014), Kenaikan Harga BBM Bikin Gerah Mafia Migas, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022, .
- Wicaksono, Kurniawan Agung, (2014). Harga BBM Naik, Sofyan Djalil Malah Yakin Inflasi Menciut, diakses pada tanggal 10 /9/276948/harga-bbm-naik-sofyan-djalilmalah-yakin-inflasi-menciut>.